

LAPORAN HASIL PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN REGISTER RISIKO PADA
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

NOMOR LHP : 061/0273.D/Manaj.Risk/2025
TANGGAL : 6 Maret 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSrE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦢꦸꦭꦏꦧꦠꦺꦤ꧀ꦭꦤ꧀ꦢꦸꦭ

Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Bantul No. 202 Telp (0274) 367325, 367675
Email: inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : 061/0273.D/Manaj.Risk/2025
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Laporan Hasil Pendampingan
Penyusunan Register Risiko pada
Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Bantul, 6 Maret 2025

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bantul
di Bantul

Bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan tugas pendampingan penyusunan risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

Dasar pelaksanaan penugasan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Bantul;

- g. Surat Tugas Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00273/PKPT/2025 tertanggal 31 Januari 2025 untuk melaksanakan pendampingan penyusunan register risiko perangkat daerah Tahun 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

2. Tujuan dan Sasaran Penugasan

Tujuan : Membantu kelancaran Perangkat Daerah dalam penyusunan risk register tahun 2025.

Sasaran : Penyusunan *Risk Register* atas Program, Kegiatan, Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

3. Ruang Lingkup Penugasan

Ruang Lingkup Penugasan meliputi:

- a. Identifikasi Risiko;
- b. Penilaian Risiko;
- c. Rencana Tindak pengendalian.

4. Metodologi Penugasan

Penugasan dilaksanakan melalui :

- a. Paparan
- b. Diskusi/tanya jawab

5. Waktu Pelaksanaan Penugasan

Pendampingan dilaksanakan selama 15 hari pemeriksaan dalam kurun waktu mulai tanggal 3 s/d 21 Februari 2025.

6. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Dinas Sosial Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Sosial, dan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pelaksanaan kebijakan di bidang sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial, pelaksanaan administrasi pada Dinas Sosial, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kabupaten Bantul melaksanakan 7 (tujuh) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan, dan 53 (lima puluh tiga) Subkegiatan dengan total belanja sebesar Rp25.801.317.155,-

Adapun program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun Anggaran 2025 tersebut terinci sebagai berikut :

Kode						Nama Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	06	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.957.650.579,00
1	06	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	339.524.499,00
1	06	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	152.353.999,00
1	06	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	187.170.500,00
1	06	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.778.270.539,00
1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.484.966.360,00
1	06	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	183.314.520,00
1	06	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	109.989.659,00
1	06	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.160.000,00
1	06	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.160.000,00
1	06	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.857.600,00
1	06	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.112.900,00
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	38.769.800,00
1	06	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000,00
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	443.039.900,00
1	06	01	2	06	10	Penatusahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.758.000,00
1	06	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.377.000,00

1	06	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.504.121,00
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000,00
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53.813.790,00
1	06	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.704.233,00
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.476.098,00
1	06	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	727.333.820,00
1	06	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	522.915.500,00
1	06	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	67.880.000,00
1	06	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	136.538.320,00
1	06	04				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	9.476.154.994,00
1	06	04	2	01		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan pengemis diluar panti sosial	9.328.143.829,00
1	06	04	2	01	01	Penyediaan Permakanan	8.105.840.688,00
1	06	04	2	01	02	Penyediaan Sandang	24.284.500,00
1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	89.958.000,00
1	06	04	2	01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	8.000.000,00
1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	298.466.397,00
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	88.078.900,00
1	06	04	2	01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu identitas anak	86.069.857,00
1	06	04	2	01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	108.431.915,00
1	06	04	2	01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.662.500,00
1	06	04	2	01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	446.424.106,00
1	06	04	2	01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	62.476.966,00
1	06	04	2	01	12	Pemberian Layanan Rujukan	8.450.000,00
1	06	04	2	02		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	148.011.165,00

1	06	04	2	02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	148.011.165,00
1	06	05				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.985.718.138,00
1	06	05	2	02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.985.718.138,00
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	534.727.898,00
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	323.519.064,00
1	06	05	2	02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.756.323.045,00
1	06	05	2	02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	371.148.131,00
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	564.482.950,00
1	06	06	2	01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	226.863.400,00
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	149.069.500,00
1	06	06	2	01	02	Penyediaan Sandang	10.421.500,00
1	06	06	2	01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.375.000,00
1	06	06	2	01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	35.920.400,00
1	06	06	2	01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	28.077.000,00
1	06	06	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	337.619.550,00
1	06	06	2	02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	38.650.000,00
1	06	06	2	02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	298.969.550,00
1	06	02				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	963.429.402,00
1	06	02	2	02		Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	17.506.000,00
1	06	02	2	02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	17.506.000,00
1	06	02	2	03		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	945.923.402,00
1	06	02	2	03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	7.890.000,00
1	06	02	2	03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	242.893.640,00
1	06	02	2	03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	71.650.000,00

1	06	02	2	03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	611.569.762,00
1	06	02	2	03	05	Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	11.920.000,00
1	06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	252.057.492,00
1	06	07	2	01		Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	252.057.492,00
1	06	07	2	01	01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	35.016.100,00
1	06	07	2	01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	185.841.392,00
1	06	07	2	01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	31.200.000,00
4	01	04				PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	3.547.141.100,00
4	01	04	5	06		Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan	3.547.141.100,00
4	01	04	5	06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	3.547.141.100,00

7. Pelaksanaan Penugasan

Pada pelaksanaan pendampingan terhadap Dinas Sosial Kabupaten Bantul:

- Tim pendampingan bertemu dengan Subbagian Tata Usaha. Tim mengutarakan maksud dan tujuan pendampingan manajemen risiko;
- Tim pendampingan menanyakan apakah Dinas Sosial Kabupaten Bantul sudah menyusun register risiko untuk tahun 2025;
- Tim pendampingan menyatakan akan memberikan pendampingan mulai tanggal 3 sd 21 Februari 2025;
- Tim pendampingan meminta data pendukung berupa Renstra, Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, dan SK Satgas SPI/SPIP Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- Tim Pendampingan memberikan penjelasan tentang penyusunan register risiko dan pentingnya manajemen risiko dalam konteks sistem pengendalian intern pemerintah yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi tentang identifikasi risiko, penyebab risiko, dampak dari risiko, pengendalian yang ada, peringatan

risiko, rencana pengendalian, penanggung jawab, dan target waktu;

- f. Dinas Sosial Kabupaten Bantul cukup memahami Manajemen Risiko dalam konteks Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan telah memiliki Tim Satgas SPIP berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 047/Dinsos Btl/II/2025 Tanggal 7 Januari 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- g. Peran Satgas SPIP pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan SPI sudah berjalan walaupun belum optimal;
- h. Dinas Sosial Kabupaten Bantul selama pendampingan telah menyusun register risiko berdasarkan dokumen anggaran yang telah ada dan mendokumentasikan identifikasi risiko, penilaian risiko, dan rencana tindak pengendalian atas semua program kegiatan subkegiatan.

8. Hasil Pendampingan

Hasil pendampingan berupa dokumen register risiko (program kegiatan subkegiatan, identitas resiko, penyebab risiko, dampak risiko, pengendalian yang ada, status risiko, rencana pengendalian, penanggung jawab, dan target waktu) sebagaimana terlampir.

9. Saran

Mengingat pentingnya register resiko sebagai salah satu dasar agar bisa memprediksi bahaya atau hal hal yang tidak menyenangkan yang akan dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul, maka kami sarankan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar:

- a. Mengoptimalkan peran Satgas SPIP pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan SPI salah satunya melalui monev rutin pelaksanaan sub kegiatan;
- b. Mendokumentasikan dengan tertib pelaksanaan Sistem Pengawasan/Pengendalian Internal (SPI) serta kejadian-kejadian penting.

- c. Register risiko selalu dievaluasi supaya lebih akurat (antara lain untuk Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan target waktu pelaksanaan) sehingga bisa berguna untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi kemudian hari.

Demikian laporan kami sampaikan, harap menjadikan periksa.

Telah Ditandatangani Secara Elektronik
Tanggal 12 Maret 2025
Nomor T/700.1.2.1/00513

PLT INSPEKTUR BANTUL,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001

Tembusan dikirim kepada Yth:

- 1) Bupati Bantul (Sebagai laporan)
- 2) Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦏꦠꦺꦴꦫꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR: T/700.1.2/00273/PKPT/2025

Dasar:

- a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Besari Setyowati, S.E., M.PA.	Pembantu Penanggung Jawab	6 HP
3.	Sulami, S.E., M.Acc.	Pengendali Teknis	15 HP
4.	Herly Nurwisjamta, S.IP., M.Si..	Ketua Tim	15 HP
5.	Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc	Anggota	15 HP
6.	Susiani, S.E.	Anggota	15 HP

- Untuk : Melaksanakan pendampingan penyusunan register risiko operasional perangkat daerah tahun 2025 pada:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - c. Dinas Kesehatan; dan
 - d. Dinas Sosial;
- Tujuan : Membantu kelancaran Perangkat Daerah dalam penyusunan risk register operasional tahun 2025
- Sasaran : Penyusunan risk register atas program, kegiatan, sub kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025.
- Ruang Lingkup : a. Identifikasi Risiko;
b. Penilaian Risiko; dan
c. Rencana Tindak pengendalian.
- Tanggal : 3 s.d. 21 Februari 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2025

Plt. Inspektur,



HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197403221993111001



1	06	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu dan tepat jumlah	5.434.966.360,00	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tidak tepat waktu dan tepat jumlah	Petugas gaji kurang pro aktif dalam pengendalian	C	Keefektifan dan kedisiplinan jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Petugas gaji membuat buku kendali	1	1	1	Rendah	Petugas gaji harus pro aktif dalam pengendalian	Sekretaris	12 bulan	
1	06	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	133.314.570,00	Pelaporan administrasi pelaksanaan tugas ASN tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi antara pelaksana tugas dan Pelaporan	C	Pelaporan keuangan tidak sesuai dengan basis yang di berikan	Meningkatkan koord nasi dalam penyusunan pelaporan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1	1	1	Rendah	Memenuhi jadwal dalam setiap proses pelaporan keuangan yang telah ditetapkan	Sekretaris	12 bulan	
1	06	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan secara berkala (12 laporan bulanan, 4 laporan triwulan, 2 laporan semesteran, 1 CAKUP)	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan secara berkala (12 laporan bulanan, 4 laporan triwulan, 2 laporan semesteran, 1 CAKUP)	109.589.659,00	Pelaporan keuangan tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi antara pelaksana tugas dan Pelaporan	C	Pelaporan keuangan tidak sesuai dengan basis yang di berikan	Meningkatkan koord nasi dalam penyusunan pelaporan keuangan	1	1	1	Rendah	Memenuhi jadwal dalam setiap proses pelaporan keuangan yang telah ditetapkan	Sekretaris	12 bulan	
1	06	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.160.000														
1	06	01	2	05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya laporan Money dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.160.000,00	Pelaporan tidak tepat waktu	Kurangnya koordinasi	C	Pelaporan belum sesuai dengan basis yang di berikan	Meningkatkan koord nasi dalam penyusunan pelaporan	1	1	1	Rendah	Memenuhi jadwal dalam setiap proses pelaporan yang telah ditetapkan	Sekretaris	1 bulan (Januari)	
1	06	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	812.857.600														
1	06	01	2	06	02	Penyediaan Perawatan dan Peningkatan Kantor	Terlaksananya kebutuhan ATK	316.112.906,00	Kurang tepatnya perhitungan dan pemilihan jumlah dan jenis ATK	Kurang tepatnya perhitungan dan pemilihan jumlah dan jenis ATK yang diburuhkan	C	Jumlah ATK habis sebelum waktunya sedangkan di beberapa jenis lainnya stok masih banyak	Mengfiskan beberapa ATK sebagai penggantian	1	1	1	Rendah	Memastikan penghitungan dan perkiraan jumlah dan jenis ATK yang dibutuhkan	Sekretaris	4 bulan (Februari, April, Juli dan Juli)	
1	06	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengendalian	Terlaksananya kebutuhan percetakan dan pengendalian	38.769.800,00	Kualitas barang cetakan kurang baik	Kendala harga barang cetakan	C	Kualitas barang cetakan terbatas	Belanja barang cetakan menyisakan anggaran	1	1	1	Rendah	Memastikan jumlah anggaran dengan mengacu pada perubahan SHBJ	Sekretaris	12 bulan	

1	06	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.800.000,00	Tercukupinya kebutuhan bahan bacaan	1	Pengurangan jumlah bahan bacaan	Kemampuan bahan bacaan	C	Meningkatnya jumlah anggaran untuk pembelian bahan bacaan	Memenuhi jumlah surat kabar	1	1	1	Rendah	Menambah jumlah anggaran	Sekretaris	12 bulan
1	06	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	413.035.900,00	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	1	Tidak maksimalnya Joplat Koordinasi (dan SKPD)	Meningkatnya frekuensi Rapat Koordinasi	C	Anggaran belanja makanan dan minuman tidak terpenuhi	Mengurangi jumlah anggaran jenis makanan dan minuman	1	1	1	Rendah	Menambah jumlah anggaran	Sekretaris	12 bulan
1	06	01	2	06	10	Penyediaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.759.000,00	Perluasan pelayanan arsip dinamis yang sesuai standard	1	Kesulitan dalam pemenuhan kembali arsip	Sarana penyimpanan arsip belum sesuai standard	C	Kelengkapan informasi akan terdapat dalam arsip	Pengurangan jumlah anggaran Unit Pengolah	2	6	6	Sedang	Pengurangan jumlah anggaran	Sekretaris	1 bulanan (April)
1	06	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.377.000,00	Meningkatnya pelayanan pelaksanaan SPBE	1	Belum maksimalnya pelaksanaan SPBE	Perangkat yang kurang memadai	C	Pelaksanaan SP 3E belum maksimal	Biaya pelaksanaan SPBE	1	1	1	Rendah	Implementasi pelaksanaan SPBE	Sekretaris	1 bulanan (April)
1	06	01	2	08		Penyediaan Jasa Perungjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.504.121														
1	06	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.510.000,00	Terpenuhi kebutuhan jasa surat menyurat	1	Kurangnya personil SDM dalam pelayanan umum	Pelayanan umum belum optimal	C	Pelayanan umum jadi terhambat	Meningkatkan koordinasi dalam ketugasan pelayanan umum	1	1	1	Rendah	Pembagian tugas agar terjadi pemerataan beban kerja	Sekretaris	4 bulanan (Februari, April, Juli, Desember)
1	06	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.813.790,00	Tercukupinya pembayaran listrik dan air	1	Proses prosedur pembayaran listrik kurang maksimal	Perengkapan SP, nota listrik sering terlambat	C	Pelengkapan dalam proses pembayaran listrik	Meningkatkan keseragaman dalam pengumpulan SPJ nya listrik	1	1	1	Rendah	Pembuatan jadwal pengumpulan nota pengumpulan SPJ	Sekretaris	12 bulanan
1	06	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	51.704.233,00	Terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	1	Terbatasnya sarana dan prasarana Kantor	Terbatasnya anggaran	C	Kinerja kurang optimal	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Kantor yang tersedia	1	1	1	Rendah	Identifikasi kebutuhan BMD	Sekretaris	11 bulanan (Non Desember)
1	06	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131.476.098,00	Terpenuhi kebutuhan pegawai Non ASN dalam pelayanan umum Kantor	1	Kurangnya personil SDM dalam pelayanan umum	Pelayanan umum belum optimal	C	Pelayanan umum jadi terhambat	Meningkatkan koordinasi dalam pelayanan umum	1	1	1	Rendah	Pembagian tugas agar terjadi pemerataan beban kerja	Sekretaris	12 bulanan

[illegible]

[illegible]

1	06	04	2	01	03	Penyediaan Alat Bantu	89.958.000	Terpenuhi ketersediaan jumlah alat bantu sesuai kondisi dan kebutuhan PPKS	1. Tidak terpenuhinya kebutuhan PPKS dalam mengakses bantuan alat bantu. 2. Stok alat bantu tidak terawat 3. Alat bantu yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan PPKS	1. Keterbatasan anggaran dalam per yediaan alat bantu 2. Tidak adanya anggaran perediaan alat bantu 3. Keterbatasan kemampuan SD M untuk menyediakan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan PPKS	UC	1. Seberfungsinya sosial PPKS tidak me ksmal karena terhambat mobilitasnya 2. keterbatasan dalam mencari mata pencaharian	1. Penambatan anggota dalam peragaan dan pemeliharaan alat bantu 2. membantu meng-kskan alat bantu yang tidak dapat difasilitasi melalui APBN/Rapel Jember sos (DNY)	4	12	Tinggi	1. Pengisian anggaran 2. peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	3 Bulan (April, Agustus dan Septem ber)
1	06	04	2	01	04	Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Keluarga	8.000.000	Mengembalikan keberfungsian sosial PPKS di lingkungan keluarga	PPKS tidak dapat direunifikasi ke pihak keluarga	1. Minak keluarga tidak mau memiliki hubungan dengan klien PPKS 2. Kondisi kel. Jarga tidak mendukung merina PPKS 3. Klien PPKS tidak memiliki keluarga	UC	Klien PPKS kembali terantar dan terganggunya keberfungsian sosialnya	Klien sama dengan pemangku wilayah dan tokoh masyarakat untuk melakukan penelusuran keluarga dan memberikan edukasi bagi keluarga PPKS	3	12	Tinggi	Peningkatan kerja sama bersama pemangku wilayah dan mempersiapkan keluarga sebelum pemulangan klien PPKS	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	5 Bulan (Januari, April, Mei, Juli dan Oktober)

1	06	04	2	01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	PPKS terdiksi, memiliki keterampilan dan memiliki motivasi 298.466.397 untuk mengembangkan diri sehingga mampu hidup secara mandiri	"Tidak ada penamban PPKS dan PPKS tidak mampu hidup secara mandiri	PPKS tidak memiliki motivasi diri dan keterampilan untuk memperbaiki kualitas hidupnya	UC	Tidak ada peningkatan kesejahteraan pada PPKS	Memberikan pelatihan keterampilan dan melakukan pemantauan kondisi PPKS dan pelatihan yang dibutuhkan	4	2	8	Sedang	Memperiapkan pembinaan tema bimbingan dan melakukan monitoring serta evaluasi pasca pemberian pelatihan	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11 bulan (Non Desember)
1	06	04	2	01	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Keluarga dan masyarakat yang berada di lingkungan PPKS terdiksi dan mampu memberikan pendampingan bagi PPKS	Kondisi klien PPKS yang sudah bagus justru menurun karena perulangan ke keluarga dan masyarakat	Keluarga dan masyarakat tidak peduli kasi terkait PPKS pasca perulangan	UC	Kerambutan klien PPKS pasca rehabilitasi dan fungsi sosial klien PPKS tidak maksimal	Kerjasama dengan pendamping sosial di wilayah PPKS dan kerja sama dengan tingkatan pemerintah daerah terkait	4	2	12	Tinggi	1. Edukasi keluarga pra pemulangan klien PPKS 2. Memasukkan jejaring dengan pendamping sosial yang ada di wilayah untuk melakukan pemantauan berkala	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	3 Bulan (April, Mei dan Juni)
1	06	04	2	01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas anak	Terpenulunya dokumen administratif bagi PPKS	PPKS tidak memiliki administrasi untuk kewarganegaraan	Rendahnya kesadaran diri PPKS untuk mengurus administrasi	UC	PPKS tidak dapat mengakses hak-ba kependudukan dan hak-haknya sebagai warga negara	Memastikan kerjasama dengan Disdukcapil dan pihak terkait	3	2	9	Tinggi	Melakukan koordinasi dengan Disdukcapil dan pihak terkait	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11 bulan (Non Desember)
1	06	04	2	01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terwujudnya penyandang disabilitas terlantar anak terlantar lanjut usia yang mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan	PPKS kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan di PPKS dan mengakses layanan kesehatan di PPKS	PPKS tidak memiliki jaminan kesehatan dan keterbatasan kuota pelayanan penyalangan pendidikan bagi PPKS	UC	PPKS tidak dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Bekerjasama dengan Jamsil-sil dan Bapejamsil-sil untuk memberikan jaminan kesehatan bagi PPKS yang belum tercover oleh BPJS dan bekenjamsil-sil dengan balai layanan sosial milik Dirsos DIY maupun milik Kemensos	4	2	12	Tinggi	Fasilitasi pembuatan BPJS PPKS dan Jamsil-sil untuk wilayah Bantul, fasilitas Jamsil-sil bagi PPKS tanpa identitas, dan pemberian rekomendasi ke balai layanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan PPKS	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11 bulan (Non Desember)

1	06	04	2	01	09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya data PPKS yang akurat dan valid 1 662.500 serta teringkasnya pengaduan yang masuk	1. Data PPKS yang lapang, serasi proses verifikasi dan akurat sehingga menjadi validasi tidak sesuai ketika digunakan sebagai acuan analisis kebijakan 2. Aduan masyarakat yang masuk tidak masuk tidak tertangani	1. Pendataan lapangan, serasi proses verifikasi dan akurat sehingga menjadi validasi tidak sesuai ketika digunakan sebagai acuan analisis kebijakan 2. Aduan masyarakat yang masuk tidak masuk tidak tertangani	1. Salah sasaran ketika digunakan sebagai acuan dalam penentuan program 2. Ketidakefektifan masyarakat kepada layanan Dinas Sosial 3. Turunnya nilai IKM Dinas Sosial	1. Menastikan kinerja petugas lapangan agar dapat menginput data yang valid dan melakukan update data secara berkala 2. Melakukan pendataan yang sesuai dengan penugasan yang telah dilakukan	3	9	Tinggi	1. Penuhan fasilitas pendukung bagi pendataan 2. Konfirmasi berkala terkait hasil pendataan 3. Merencanakan masuk dan progres penanganannya	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 bulan (April)
1	06	04	2	01	10	Pemberian Layanan Sedurutan	Terlaksananya PPKS dalam kondisi darurat di dalam maupun di luar shelter Kesejahteraan Sosial	Kondisi PPKS semakin memburuk	PPKS dalam kondisi darurat tidak dibantu pelayanan dengan segera	PPKS menjadi terlarut kondisi kesehatan memburuk, meningkat dunia, dan keterbatasan masyarakat dapat terganggu dengan segera	4	16	Sangat Tinggi	Meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	12 Bulan	
1	06	04	2	01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Keluarga PPKS dapat dielusuri	Keluarga tidak ditemukan atau keluarga menutup diri ketika diadak komunikasi	1. Keluarga tidak dapat profil dengan baik PPKS 2. Keterbatasan informasi awal sebagai acuan penelusuran keluarga	Tidak dapat melakukan terifikasi keluarga karena keluarga tidak dirumahnya atau keluarga menolak	3	9	Tinggi	1. meningkatkan kerjasama dengan pihak terkait 2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam melakukan penelusuran dan edukasi ke keluarga PPKS	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 bulan (April)	

1	06	04	2	01	12	Pemberian Layanan rujukan		8.450.000	Klien PPKS dapat dirujuk sesuai dengan hasil asesmen PPKS	Klien PPKS tidak dapat dirujuk	Sentra/ Balai rehabilitasi memiliki keterbatasan daya tampung	UC	Rehabilitasi terhadap klien PPKS tidak maksimal dan layanan yang diberikan tidak tuntas	Meningkatkan kerja sama dengan balai-balai pelayanan sosial milik Dinas DIY maupun Kemitraan	3	3	9	Tinggi	Kerjasama Dinas Bantu dengan Balai Layanan Sosial terkait	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	3 Bulan (Februari, Mei dan November)
1	06	04	2	02		Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAZA di Luar Panti Sosial		148.011.163,00													
1	06	04	2	02	0007	Pemberian Bimbingan Fik, Mental, Spiritual, dan Sosial		148.011.165	PPKS lainnya terduga, memiliki keterampilan, memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, dan mampu hidup secara mandiri	Tidak ada penambahan keterampilan bagi PPKS Lainnya sehingga kesulitan dalam meningkatkan kesegiahteraannya	PPKS Lainnya tidak memiliki motivasi diri untuk meningkatkan keterampilan dan memperbaiki kualitas hidupnya	UC	Tidak ada peningkatan kesegiahteraan bagi PPKS Lainnya	Memberikan sosial sasi dan pelatihan keterampilan bagi PPKS Lainnya	4	4	8	Sedang	Memperiapkan perencanaan tema bimbingan sosial bagi PPKS Lainnya dan melakukan monitoring evaluasi pasca pemberian pelatihan	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	11 bulan (Non Desember)
1	06	05				PROGRAM PERLINUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		2.985.718.138													
1	06	05	2	02		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		2.985.718.138,00													
1	06	05	2	02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		534.727.898,00	Terdapatnya Fakir Miskin	Pendataan belum optimal dan adanya kegiatan pendataan lain	Kurangnya personil SDM dalam pendataan dan keterlambatan pelaksanaan kegiatan	UC	Pendataan jati diri lambat	Meningkatkan koordinasi dan peningkatan komitmen dalam ketugasan pendataan	4	4	16	Sangat Tinggi	Meningkatkan kemampuan SDM Pendata, meningkatkan komitmen dalam ketugasan dan mengoptimalkan SDM yang ada	Sekretaris	12 bulan
1	06	05	2	02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota		313.519.064,00	Terdapatnya Data Fakir Miskin	Pengelolaan data belum optimal	Kurangnya personil SDM dalam pengelolaan data fakir miskin	C	Pengelolaan data kurang optimal	Meningkatkan koordinasi dan peningkatan komitmen dalam ketugasan Pendataan	4	4	16	Sangat Tinggi	Meningkatkan kemampuan SDM Pendata, meningkatkan komitmen dalam ketugasan dan mengoptimalkan SDM yang ada	Sekretaris	12 bulan

1	06	05	2	02	03	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1.736.323.045,00	Bantuan sosial tepat sasaran	1	Bantuan tidak tepat sasaran	Data Perkiraan manfaat bhm akurat	C	Bantuan yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan konflik sosial	Meningkatkan koordinasi dan komitmen dalam perbaikan dan updating data penerima	Sekretaris	12 bulan
1	06	05	2	02	04	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	371.148.131,00	Mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi wanita yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang rentan	1	Belum maksimalnya pelayanan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kurangnya data penerima manfaat, Motivasi Penerima Manfaat kurang	C	Peleaksaraan belum maksimal	Mengoptimalkan peran pendamping dalam pengendalian dan motivasi Penerima Manfaat WKSPP	Sekretaris	12 bulan
1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	564.482.950									
1	06	06	2	01		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	236.863.400,00									
1	06	06	2	01	01	Penyediaan Makanan	149.069.500,00	Tercukupinya kebutuhan permaknaan bagi Masyarakat/Korban Bencana	1	Penyimpanan bahan makanan kurang memadai sehingga beresiko rusak dan kadaluwarsa	Terdapat/gudang kurang memadai	C	Penyediaan makanan kadaluwarsa dan rusak sebelum waktunya	Meningkatkan jeda waktu pengecekan stok makanan dan kondisi gudang	Sekretaris	11 bulan (Non Januari)
1	06	06	2	01	02	Penyediaan Sandang	10.421.500,00	Tercukupinya kebutuhan Sandang bagi masyarakat/Korban bencana	1	Kurang tepatnya pemilihan jumlah dan jenis sandang	Kurang tepatnya perhitungan dan perkiraan jumlah dan jenis sandang yang dibutuhkan	C	Sandang rusak sebelum waktunya beberapa jenis belutnya, stok masih banyak	Meningkatkan penghitungan dan perkiraan jumlah dan jenis sandang yang dibutuhkan	Sekretaris	3 bulan (Maret, April dan November)
1	06	06	2	01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	3.375.000,00	Tercukupinya tempat pengungsian	1	Kurang tepatnya pemulihan tempat untuk pengungsian	Kurang tepatnya perhitungan dan perkiraan jumlah pengungsi dengan tempat pengungsian	C	Tempat pengungsian kurang memadai	Mengfisienkan beberapa kriteria untuk pengungsi terdampak bencana	Sekretaris	4 bulan (April, Juli, Oktober dan Desember)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4	01	04	5	06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelenbagaan	3.547.141.100,00	Memperoleh Data sosial ekonomi dengan aplikasi SIP/DEDET CANTIK	1	Pendataan yang belum optimal	Kualitas SDM yang belum maksimal	C	Xerelambatan pendataan	Memetakan dan menentukan target jadwal pendataan. Menentukan kriteria petugas, menutungkan komitmen	1	1	1	Meningkatkan Money Pelaksanaan Pendataan, Meningkatkan komitmen pelaksanaan Pendataan, Meningkatkan Koordinasi	Sekretaris	8 bulan (Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli dan Agustus)
---	----	----	---	----	------	---	------------------	---	---	------------------------------	----------------------------------	---	------------------------	---	---	---	---	--	------------	--

Keterangan:

- Nama SKPD diisi dengan nama SKPD masing-masing.
- Tujuan diisi sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam Renstra. Jika memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan maka membuat register risiko dan rencana pengendalian sesuai dengan jumlah tujuan yang ada.

- (1) Diisi dengan nomor urut;
- (2) Diisi dengan nama kegiatan utama sesuai pengelompokan dalam pencapaian tujuan (sesuai matrik Rencana Strategik)
- (3) Diisi dengan tujuan kegiatan sesuai dengan sasaran/target kinerja sasaran;
- (4) Untuk no. diisi dengan kode/nomor risiko;
- (5) Diisi dengan pernyataan risiko potensial yang diidentifikasi berdasar pencapaian tujuan;
- (6) Diisi dengan penyebab/pemicu terjadinya risiko tersebut;
- (7) Diisi kategori penyebab, apakah uncontrollable (UC) atau Controllable (C) bagi unit kerja
- (8) Diisi dengan uraian dampak jika risiko kolom (5) terjadi;
- (9) Diisi uraian/nama kegiatan pengendalian yang sudah ada
- (10)Diisi dengan tingkat probabilitas/kemungkinan (K), yaitu tingkat kemungkinan terjadinya risiko. Tingkat kemungkinan terjadinya risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
- (11)Diisi dengan tingkat dampak (D), yaitu tingkat besaran dampak jika risiko terjadi. Tingkat dampak risiko dapat diperoleh dari pengalaman sebelumnya atau hasil diskusi (FGD). Diisi dengan nilai skala 1 s.d. 5;
- (12)Diisi dengan tingkat risiko (TR), yaitu perkalian antara probabilitas/kemungkinan terjadi (K) dan dampak (D);
- (13)Diisi dengan tingkat risiko, apakah rendah, sedang, moderat, tinggi atau ekstrim;
- (14)Diisi dengan rencana pengendalian risiko/pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya);
- (15)Diisi dengan siapa yang bertanggung jawab atas risiko (pemilik risiko);
- (16)Diisi dengan jadwal waktu pengembangan infrastruktur pengendalian (misal kebijakan/SOP/aturan lainnya).

